

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konflik Suriah yang berkepanjangan telah membawa dampak yang sangat buruk bagi kondisi negara dan kehidupan warga sipil di Suriah. Dalam menghadapi situasi konflik, muncul respon dari komunitas internasional untuk memberikan bantuan, salah satu nya dengan melakukan implementasi prinsip Responsibility to Protect sebagai upaya penyelesaian konflik dan juga membuka akses untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Suriah yang sudah sangat membutuhkan. Namun, pemerintah Suriah secara tegas menolak implementasi prinsip Responsibility to Protect diterapkan di Suriah sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini memberikan jawaban faktor-faktor apa saja yang mendasari pemerintah Suriah untuk mengambil keputusan menolak implementasi R2P.

Alasan utama yang mendasari penolakan R2P adalah mengenai kedaulatan nasional. Pemerintah Suriah dengan sangat kuat ingin melindungi kedaulatan nasional nya. Pemerintah Suriah melihat prinsip R2P sebagai ancaman yang dapat menodai prinsip kedaulatan nasional dan non-intervensi yang dipegang oleh pemerintah Suriah, alasan utama ini juga mempengaruhi alasan-alasan lain yang turut mempengaruhi penolakan tersebut. Pemerintah Suriah berpendapat bahwa intervensi internasional lewat implementasi prinsip Responsibility to Protect tidak selalu membawa dampak yang signifikan dan jangka panjang, seringkali intervensi justru dapat membuat situasi menjadi semakin kompleks.

Penolakan implementasi R2P sebagai upaya penyelesaian konflik Suriah juga didasari oleh ketidakpercayaan pemerintah Suriah kepada mekanisme internasional. Pemerintah Suriah berpendapat bahwa mekanisme internasional yang akan diterapkan sebagai sebuah bantuan, seringkali ditunggangi oleh kepentingan atau agenda politik dari negara-negara barat, sehingga bantuan yang diberikan tidak benar-benar bersifat objektif. Penolakan pemerintah Suriah

terhadap implementasi Responsibility to Protect mencerminkan adanya ketegangan antara upaya untuk melindungi warga sipil dari kejahatan massal dan kedaulatan nasional yang dianggap sangat penting oleh pemerintah Suriah. Hasil dari penelitian ini yang menjelaskan alasan-alasan pemerintah Suriah, seperti R2P akan menjadi ancaman bagi kedaulatan, stabilitas dan potensi perubahan rezim, menunjukkan bahwa R2P belum bisa menjadi prinsip yang diterima secara universal, terutama ketika menyangkut intervensi militer dan konflik wilayah.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa prinsip Responsibility To Protect (R2P) belum benar-benar mampu dan efektif untuk menjadi salah satu opsi upaya penyelesaian sebuah konflik, sehingga perlu adanya evaluasi dan tinjauan ulang khususnya dalam hal efektivitas dan seberapa jauh prinsip Responsibility to Protect ini dapat menjadi upaya yang kuat untuk menyelesaikan konflik di suatu negara. Dengan demikian, penerapan R2P dalam konteks konflik Suriah ini masih menjadi perdebatan yang rumit dan memerlukan pendekatan yang lebih dalam dan konsensus internasional yang kuat.